

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan

##### 1. *Grand Theory*

##### a. *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*)/pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Teori keagenan adalah teori yang mengemukakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (Jensen dan Meckling:1976). Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan, justru dapat menimbulkan permasalahan keagenan, yaitu munculnya konflik kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pengelola perusahaan.

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaan yang meningkat, sedangkan agen termotivasi untuk memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Di lain pihak, agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Menurut *Dechow et al (1995)* ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

Dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah sebuah teori yang membahas tentang hubungan antara orang yang memiliki perusahaan yaitu prinsipal, dengan orang yang diperkerjakan untuk mengelola perusahaan yaitu agen. Hubungan antara prinsipal dan agen tersebut seharusnya menjadi hubungan yang membawa keuntungan bagi semua pihak, terutama apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab. Tapi pada kenyataannya, hal tersebut justru menyebabkan munculnya permasalahan agensi antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola perusahaan.

Menurut *Jensen dan Meckling (1976)*, adanya konflik keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- 1.) *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2.) *The bounding expenditure by agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
- 3.) *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Konflik keagenan ini dapat diminimalisir dengan pengawasan dari mekanisme *good corporate governance* yang diharapkan dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, serta mengurangi praktik-praktik yang mungkin dilakukan oleh agen yang dapat merugikan prinsipal.

## 2. Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka akan mensejahterakan pemilik perusahaan tersebut. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya adalah Tobin's Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena Tobin's Q memasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan, namun seluruh asset perusahaan.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi (Herawaty, 2008). Semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan, maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut.

### 3. Manajemen Laba

#### a. Definisi Manajemen Laba

Menurut Paul M. Healy dan James M. Wahlen (1999) :

*“earning management occurs when manager use judgement in financial reporting and in structuring transaction to after financial reports to either mislead some*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*stakeholders about the underlying economics performance of the company or to influence contractual out comes that depend on reported accounting numbers.”*

Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya.

Widianingdyah (2001) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu :

1) Definisi sempit

Perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besaran labanya.

2) Definisi luas

Tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Manajemen laba tidak harus selalu dikaitkan dengan proses manipulasi oleh manajer, tetapi lebih cenderung dikaitkan dengan proses pemilihan metode akuntansi (*accounting method*) untuk mengatur keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan karena memang diperkenankan menurut *accounting regulation*. Tetapi manajemen laba ini tetap akan merugikan para pemegang saham karena mereka mendapatkan informasi perusahaan yang disajikan secara tidak ril oleh manajer sehingga mereka tidak dapat memprediksikan secara tepat keuntungan yang akan mereka peroleh dari dana yang telah diinvestasikan ke dalam perusahaan tersebut.



Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan *economic advantage* yang keliru kepada organisasi dan dalam jangka panjang akan sangat mengganggu, bahkan dapat membahayakan perusahaan.

### **Pola Manajemen Laba**

Terdapat empat pola manajemen laba yang dapat dilakukan manajer menurut Scott (2015:447), yaitu :

#### 1) *Taking a bath*

Teknik ini dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan. Dengan demikian, laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari sebelumnya.

#### 2) *Income Minimization*

Cara ini mirip dengan *taking a bath*, namun kurang ekstrim. Cara ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara positif. *Income minimization* biasanya dilakukan saat perusahaan sedang mendapat setoran publik selama masa keuntungan sangat tinggi untuk menghindari pajak. Caranya dengan penghapusan yang lebih cepat untuk barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebasan untuk biaya-biaya dimasa depan, pemilihan metode akuntansi tertentu dan sebagainya.

#### 3) *Income Maximization*



Kebalikan dari *income minimization*, *income maximization* dilakukan dengan mengakui pendapatan wajarnya yang diakui dimasa depan dan menunda pembebanan yang seharusnya sudah dilakukan. *Income maximiation* dilakukan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak utang jangka panjang, manajer perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba.

#### 4) *Income Smoothing*

*Income smoothing* merupakan cara yang paling sering dilakukan dan paling populer. Melalui *income smoothing*, manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. Kegunaannya adalah untuk menarik dan meyakinkan calon investor, membuat kinerja perusahaan tampak meningkat dengan stabil, dan pada akhirnya menurunkan biaya modal.

### c. **Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil**

Menurut Roychowdhury (2006:337), manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil merupakan suatu tindakan manajemen yang menyimpang praktik bisnis perusahaan secara normal dengan tujuan utama untuk mencapai target laba yang diharapkan. Akan tetapi, target laba terpenuhi tidak selalu memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan meskipun target telah tercapai. Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas sehari-hari perusahaan selama periode berjalan.



Sedangkan manajemen laba melalui manipulasi akrual dapat dilakukan selama periode akuntansi berjalan perusahaan.

Menurut Roychowdhury (2006: 340), manajemen laba melalui aktivitas riil dilakukan melalui arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya-biaya diskresioner.

#### 1) Arus Kas Operasi

Arus kas operasi merupakan salah satu jenis aktivitas dari laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan. Metode yang digunakan untuk melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas operasi adalah manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan berkaitan mengenai manajer yang mencoba menaikkan penjualan selama periode akuntansi dengan tujuan meningkatkan laba untuk memenuhi target laba yang diharapkan. Tindakan oportunistik manajer melalui manipulasi penjualan ini dapat dilakukan dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang sangat lunak. Strategi ini tentu dapat meningkatkan volume penjualan dan laba. Volume penjualan yang meningkat menyebabkan laba tahun berjalan tinggi namun arus kas menurun karena arus kas masuk kecil akibat penjualan kredit dan potongan harga. Oleh karena itu, aktivitas manipulasi penjualan menyebabkan arus kas kegiatan operasi periode sekarang menurun dibandingkan level penjualan normal dan pertumbuhan abnormal dari piutang.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui arus kas operasi menggunakan arus kas operasi abnormal (ABN\_CFO). Arus kas operasi abnormal diperoleh dari selisih nilai arus kas operasi aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan arus kas kegiatan operasi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CFO}_t / \text{At}_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1/\text{At}_{t-1}) + \alpha_2 (\text{St} / \text{At}_{t-1}) + \alpha_3 (\Delta\text{St} / \text{At}_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (1)$$

Keterangan:

$\text{CFO}_t$  = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

$\text{At}_{t-1}$  = aset total perusahaan i pada tahun t-1

$\text{St}$  = penjualan total perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta\text{St}$  = perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun t  
dengan tahun t-1

$a_0$  = konstanta.

$\text{Et}$  = *error term* pada tahun t

(Roychowdury, 2006: 344)

## 2) Biaya Diskresioner

Biaya diskresioner merupakan biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akrual dengan output. Biaya-biaya diskresioner (*discretionary expenditures*) yang digunakan dalam melakukan tindakan pemanipulasian antara lain biaya iklan, biaya riset dan pengembangan (R&D), serta biaya penjualan, umum, dan administrasi. Perusahaan dapat menurunkan atau mengurangi biaya diskresioner yang pada akhirnya akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan laba periode berjalan dan dapat juga meningkatkan arus kas periode sekarang jika perusahaan secara umum membayar biaya seperti itu secara tunai. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan risiko menurunkan arus kas periode mendatang.

Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya diskresioner dengan menggunakan biaya diskresioner abnormal (ABN\_DISEXP). Biaya diskresioner abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya diskresioner aktual yang dikala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan biaya diskresioner normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{DISEXP}_t/\text{At}_{-1} = a_0 + a_1(1/\text{At}_{-1}) + \beta(\text{St}/\text{At}_{-1}) + e_t \quad (2)$$

Keterangan:

$\text{DISEXP}_t$  = biaya diskresioner pada tahun t

$\text{At}_{-1}$  = total aktiva pada tahun t-1

$\text{St}$  = penjualan pada tahun t

$a_0$  = konstanta

$e_t$  = *error term* pada tahun

(Roychowdury, 2006: 345)

### 3) Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan segala biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang. Metode yang digunakan dalam

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan manipulasi riil melalui biaya produksi ini adalah produksi berlebih (*overproduction*). Manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dari pada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap (*fixed cost*) per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan *cost of goods sold* dan meningkatkan laba operasi.

Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya produksi menggunakan biaya produksi abnormal (ABN\_PROD). Biaya produksi abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya produksi aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan biaya produksi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PROD}_t/\text{At}_{t-1} = a_0 + a_1(1/\text{At}_{t-1}) + \beta_1(\text{St}/\text{At}_{t-1}) + \beta_2(\text{DSt}/\text{At}_{t-1}) + \beta_3(\text{DSt}_{t-1}/\text{At}_{t-1}) + e_t \quad (3)$$

Keterangan:

$\text{PROD}_t$  = biaya produksi pada tahun t, yaitu: harga pokok penjualan + perubahan persediaan

$\text{At}_{t-1}$  = total aktiva pada tahun t-1

$\text{St}$  = penjualan pada tahun t

$\Delta\text{St}$  = penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1

$\Delta\text{St}_{t-1}$  = perubahan penjualan pada tahun t-1

$a_0$  = konstanta

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

et = *error term* pada tahun

#### 4. **Good corporate governance**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

##### **Definisi *Good corporate governance***

*Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2004) menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan peundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara berbagai pihak dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan mencapai kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Istilah *Good corporate governance* untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Comitte* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal dengan *Cadbury Report*. Isu mengenai *good corporate governance* mulai muncul di Indonesia khususnya setelah Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *good corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia.

*Good corporate governance* menyediakan pedoman bagaimana mengendalikan dan mengarahkan perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan dan dapat bermanfaat untuk seluruh *stakeholder* dalam jangka panjang. *Stakeholder* dalam hal ini, termasuk semua pihak dari dewan direksi, manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

#### **5. Manfaat *Good corporate governance***

Manfaat *good corporate governance* menurut *Forum for Good corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

#### **Prinsip-prinsip *Good corporate governance***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* menurut *Forum for Good corporate governance In Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1) *Fairness* (keadilan)

Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama.

2) *Transparency* (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholder*).

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

4) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai *good corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Mekanisme *Good corporate governance*

Ⓒ Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal (*internal mechanism*), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme eksternal (*external mechanism*), seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.

Pada perusahaan publik yang besar, umumnya para pemilik (*principal*) menggaji manajer (*agent*) untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya dari hari ke hari. Manajer sebagai pengelola perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dengan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Karena adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, maka hal tersebut memotivasi agen untuk menyajikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya kepada prinsipal, terutama yang berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan cara meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen sehingga manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas laba yang dihasilkan dan nilai perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat dipengaruhi oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajemen yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan pemegang saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus pemegang saham. Selain itu, jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer (Siswantaya, 2007). Selain itu manajer dapat merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga setiap

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu, permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga dianggap sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengurangi manajemen laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kepemilikan institusional contohnya adalah kepemilikan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi, maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen dengan pemegang saham.

Pemegang saham institusional cenderung mempunyai informasi lebih banyak dari pada pemegang saham individu. Pada umumnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dan investor institusional tersebut dapat membatasi perilaku manajer. Dengan demikian keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Terakhir, mekanisme *good corporate governance* yang dianggap mampu mengurangi praktek manajemen laba dan meningkatkan nilai perusahaan adalah keberadaan komite audit dalam perusahaan.

Arens *et al* (2010: 135), menjelaskan pengertian komite audit adalah: “*Audit committees is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management . Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.*”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima atau kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya, keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan diharapkan bisa mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance (Independency, transparency, accountability and responsibility, and fairness)* pada perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan publik maupun BUMN membentuk komite audit karena ingin membangun perusahaan yang Akuntabilitas dan Transparan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003, menyatakan:

- 1) Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit;
- 2) Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*);
- 3) Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris;
- 4) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan keputusan tersebut komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan, yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenis tugas dan tanggung jawab komite audit yang diangkat sebuah perusahaan tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing-masing perusahaan. Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab komite audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab *Board of Commisioner*.

Wewenang komite audit harus meliputi :

- 1) Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 2) Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
- 3) Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
- 4) Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila dianggap perlu.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

Selain itu, Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa komite audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.



*Forum for Good corporate governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan

bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal:

1) Laporan Keuangan

Komite audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya.

2) Pengawasan Kontrol (*Corporate Control*)

Komite audit memberikan pengawasan independen atas masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung risiko.

3) Tata Kelola Perusahaan

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *good corporate governance* apakah telah dijalankan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Menurut keputusan menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002, Komite audit bertugas:

- 1) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- 3) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

- 4) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Auditor harus mengutamakan independensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak boleh memihak kepada pihak manapun. Arens *et al* (2010: 134-135) , menjelaskan bahwa independensi terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Independensi dalam penampilan (*Independent In Appearance*) merupakan independensi yang selama bertugas selalu menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independensinya.
- 2) Independensi dalam pikiran (*Independent Of Mind*) merupakan sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan professional auditor.

Dari kedua pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Prinsip Independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menjaga kualitas

laporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl.24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diringkas sebagai berikut :

- 1) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- 2) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- 3) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- 4) Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
- 5) Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain.

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. BAPEPAM juga mengimbau bahwa setidaknya-tidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan



## B. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian terdahulu yang ditunjukkan melalui tabel yang terdiri dari judul penelitian, peneliti, tahun penelitian, periode, variabel, dan hasil.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

	Judul penelitian Peneliti/Tahun Penelitian	Periode	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p><b>Mekanisme Good corporate governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan</b></p> <p>Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz (Simposium Nasional IX, Padang) 2006</p>	2000-2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan Manajerial</li> <li>- Dewan Komisaris</li> <li>- Komite Audit</li> <li>- Kualitas Laba</li> <li>- Nilai Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan manajerial dan Komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba</li> <li>- Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kualitas laba</li> <li>- Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan</li> <li>- Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>- Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan</li> <li>- Kualitas laba bukan variabel permoderasi antara GCG dan Nilai perusahaan.</li> </ul>
2	<p><b>Peran Praktek Good corporate governance sebagai Moderating Variable dari pengaruh</b></p>	2004-2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earnings Management</i></li> <li>- Nilai Perusahaan</li> <li>- Kepemilikan Institusional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earnings management</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan</li> <li>- Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan kualitas audit berpengaruh positif</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencanturkannya sebagai sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan</b> Vinola Herawaty (Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol.10) 2008</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan manajerial</li> <li>- Komisaris independen</li> <li>- Kualitas Audit</li> </ul>	<p>terhadap nilai perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan</li> </ul>
	<p><b>Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Good corporate governance sebagai Pemoderasi</b> Herman Darwis (Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16) 2012</p>	<p>2008-2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba</li> <li>- Kepemilikan Manajerial</li> <li>- Kepemilikan Institusional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan</li> <li>- Variabel moderating kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan</li> <li>- Variabel moderating kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan nilai perusahaan.</li> </ul>
	<p><b>Peran Mekanisme Good corporate governance sebagai Pemoderasi Praktik Earning Management terhadap Nilai Perusahaan.</b> Mochammad Ridwan dan Ardi Gunardi (Trikonomika, Vol.12) 2013</p>	<p>2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earnings Management</i></li> <li>- Komisaris Independen</li> <li>- Kepemilikan Institusional</li> <li>- Kepemilikan Manajerial</li> <li>- Komite Audit</li> <li>- Klasifikasi Akuntan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earnings management</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>- Komisaris independen dan Komite audit bukan variabel yang memoderasi <i>earnings management</i> dengan nilai perusahaan</li> <li>- Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan klasifikasi akuntan adalah variabel yang memoderasi <i>earnings management</i> dengan nilai perusahaan.</li> </ul>



## C. Kerangka Pemikiran

Terjadinya kasus manipulasi laba yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* khususnya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit diharapkan mampu mempengaruhi praktik manajemen laba yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *good corporate governance* memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

### 1. Manajemen Laba Berpengaruh Negatif Terhadap Nilai Perusahaan

Tujuan manajemen laba adalah untuk mendapatkan bonus, menampilkan kondisi perusahaan yang sehat dan stabil dan mengurangi pembayaran pajak. Kinerja perusahaan dapat mempengaruhi manajemen laba khususnya jika kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian. Sehingga tindakan manajemen laba ini diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan pada saat tertentu lalu akan turun.

Menurut Vinola Herawaty (2008), manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham) sehingga menimbulkan asimetri informasi. Asimetri antara manajemen dan pemilik memberikan kesempatan pada manajer untuk melakukan manajemen laba untuk meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai nilai perusahaan yang sebenarnya.



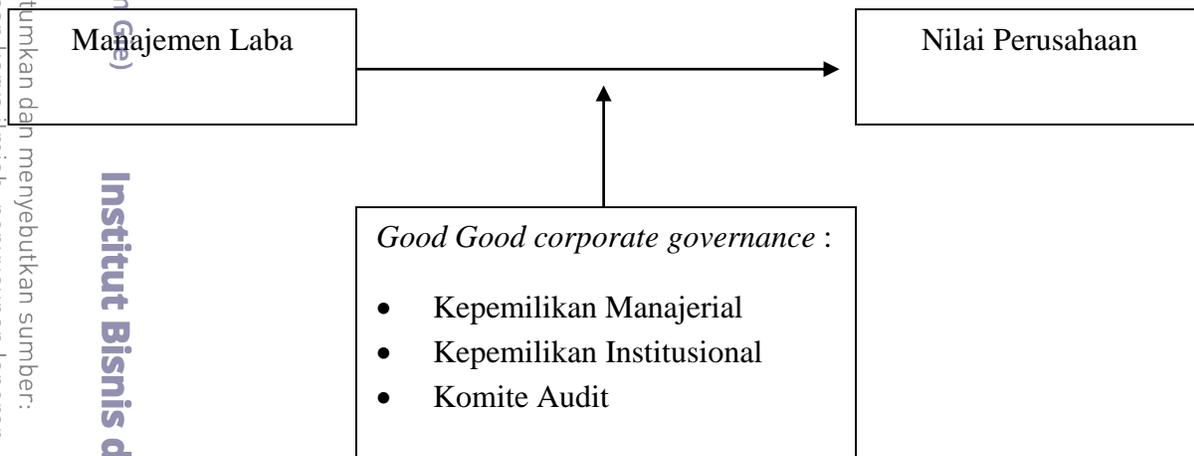
## 2. Mekanisme *Good corporate governance* Memperlemah Pengaruh Manajemen

### Laba terhadap Nilai Perusahaan

Manajemen melakukan tindakan oportunistik dengan alasan meningkatkan nilai perusahaan dengan manajemen laba. *Good corporate governance* merupakan proksi yang diharapkan dapat menurunkan nilai manajemen laba. Perusahaan yang menyelenggarakan sistem *good corporate governance* diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit, semakin kecil kemungkinan manajemen laba dilakukan. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini akan dimasukkan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran



### D. Hipotesis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis

penelitian sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H<sub>2</sub> : *Good Corporate governance* memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.